



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
**UNIT KERJA** : DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MADE ASTIKA
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 421453

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.199.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/54 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 520.000.000
3. Tanah Seluas 130 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 399.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 386.000.000

1. MOTOR, DK 5955 UV 2 DP / SEPEDA MOTOR SOLO NMAX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 18.500.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY F1C02N28L0 A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOBIL, TOYOTA VELOZ W101RE-LBVEJ 15 Q GVT/MINIBUS - 001 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 324.000.000
4. MOTOR, YAMAHA BBP-L A/T/SOLO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 28.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 35.500.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 271.980

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 1.620.771.980

**III. HUTANG** Rp. 508.779.252

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.111.992.728



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.